



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 14.323.522.513.391 bertambah sebesar Rp. 1.124.314.895.866 sehingga menjadi Rp. 15.447.837.409.257 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                       |                    |
|--|-----------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan daerah                       |                       |                    |
| a. Semula                                  | Rp.13.458.522.513.391 |                    |
| b. Bertambah                               | Rp. 917.140.484.016   |                    |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp.                   | 14.375.662.997.407 |

2. Belanja daerah			
a. Semula	Rp.14.273.522.513.391		
b. Bertambah	Rp. 1.118.314.895.866		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp.	15.391.837.409.257
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp. 865.000.000.000		
2) Bertambah	Rp. 207.174.411.850		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.	1.072.174.411.850
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp. 50.000.000.000		
2) Bertambah	Rp. 6.000.000.000		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	56.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp.	1.016.174.411.850

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.7.857.572.685.351		
2) Bertambah	Rp. 881.140.484.016		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.	8.738.713.169.367
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp.5.502.890.363.040		
2) Bertambah	Rp. 30.000.000.000		
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp.	5.532.890.363.040
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 98.059.465.000		
2) Berkurang	Rp. 6.000.000.000		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp.	104.059.465.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp.7.138.147.932.329

2) Bertambah Rp. 289.190.762.931

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 7.427.338.695.260

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 40.477.979.540

2) Bertambah Rp. 15.408.696.500

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 55.886.676.040

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 354.759.991.476

2) Bertambah Rp. 49.049.542.202

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 403.809.533.678

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 324.186.782.006

2) Bertambah Rp. 527.491.482.383

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 851.678.264.389

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp.5.502.890.363.040

2) Bertambah Rp. 30.000.000.000

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 5.532.890.363.040

(3) Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 73.059.465.000

2) Bertambah Rp. 6.000.000.000

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 79.059.465.000

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	25.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	25.000.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp.	7.860.920.503.308
2) Bertambah	Rp.	546.535.349.023
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	8.407.455.852.331
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	3.266.144.300.642
2) Bertambah	Rp.	588.690.224.636
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	3.854.834.525.278
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	99.905.072.868
2) Berkurang	Rp.	16.910.677.793
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	82.994.395.075
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	3.046.552.636.573
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	3.046.552.636.573

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	3.571.413.675.702
2) Berkurang	Rp.	23.096.280.384
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	3.548.317.395.318



b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp.2.350.513.226.049

2) Bertambah Rp. 663.095.247.806

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 3.013.608.473.855

c. Belanja hibah

1) Semula Rp.1.915.484.001.557

2) Berkurang Rp. 85.774.018.399

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 1.829.709.983.158

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 23.509.600.000

2) Berkurang Rp. 7.689.600.000

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 15.820.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersumber dari:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 165.770.430.420

2) Berkurang Rp. 7.239.624.400

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 158.530.806.020

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 273.068.519.076

2) Bertambah Rp. 170.354.762.855

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 443.423.281.931

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp.1.033.095.314.926

2) Berkurang Rp. 71.381.705.182

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp. 961.713.609.744

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp.1.763.078.803.062

2) Bertambah Rp. 382.647.087.901

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

setelah perubahan Rp. 2.145.725.890.963

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- 1) Semula Rp. 31.131.233.158
- 2) Bertambah Rp. 114.309.703.462

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 145.440.936.620

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

- a. Semula Rp. 99.905.072.868
- b. Berkurang Rp. 16.910.677.793

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 82.994.395.075

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari:

a. Belanja bagi hasil

- 1) Semula Rp.2.704.480.636.573
- 2) Bertambah Rp. 0

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.704.480.636.573

b. Belanja bantuan keuangan

- 1) Semula Rp.342.072.000.000
- 2) Bertambah Rp. 0

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 342.072.000.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp. 865.000.000.000
- 2) Bertambah Rp. 207.174.411.850

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 1.072.174.411.850

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp. 50.000.000.000
- 2) Bertambah Rp. 6.000.000.000

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 56.000.000.000

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- a. Semula Rp. 865.000.000.000
  - b. Bertambah Rp. 207.174.411.850
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.072.174.411.850
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari penyertaan modal daerah, yaitu :
- a. Semula Rp. 50.000.000.000
  - b. Bertambah Rp. 6.000.000.000
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 56.000.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710413 199603 1 002